

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang Negara dan hubungan antar Negara, termasuk peran dari setiap Negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah Internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional.

Istilah Hubungan Internasional memiliki beberapa arti.

1. Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek – aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan
2. Sejarah baru dari politik Internasional
3. Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti: semua tingkah laku manusia yang terjadi atau yang bermula di suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku di negara lain
4. Suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri (Darmayadi, 2015: 22).

Hubungan Internasional menurut Charles McClelland adalah studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara (Perwita & Yani, 2005:4). Seymond Brown mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai aksi dan reaksi dari negara-negara yang berdaulat dan diwakilkan oleh para pejabat

yang berkuasa di negara-negara tersebut. Selanjutnya Hubungan Internasional juga diartikan sebagai *struggle for power among nations* (perjuangan untuk kekuasaan oleh bangsa-bangsa) oleh Hans Morgenthau (Bakry, 2017:2).

Hubungan Internasional seringkali dianggap sebagai cabang dari ilmu politik, tetapi Hubungan Internasional juga membahas tentang sejarah (sejarah internasional, sejarah diplomatik), ekonomi (ekonomi internasional), studi legal (hukum internasional publik) dan filsafat (etika internasional) (Jackson & Sorensen, 2016:4). Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan utama dalam studi Hubungan Internasional yaitu mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor dalam hubungan internasional. Perilaku atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), pertentangan (*conflict*), pembentukan aliansi hingga interaksi dalam sebuah organisasi internasional.

Hubungan Internasional yang pada awal mulanya hanya mengkaji tentang perang dan damai kemudian diperluas bentuk kajiannya, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus terhadap hubungan politik antar Negara akan tetapi mencakup juga peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor – aktor bukan Negara, hal inilah yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003 : 51).

Hubungan Internasional adalah hubungan antar Negara – Negara yang ada di belahan dunia dimana di dalam Hubungan Internasional itu sendiri terdapat komponen - komponen yang mempengaruhi kerja dari Hubungan Internasional sendiri yakni dengan adanya analisis tentang perbandingan politik luar negeri

negara, hukum internasional, organisasi - organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan (area studies), studi - studi strategis (strategis studies), pembangunan internasional, komunikasi internasional, dan studi perdamaian serta upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata.

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peran negara sebagai aktor dalam politik dunia dan ditambahkan dengan meningkatnya peranan aktor non negara. Batas-batas yang memisahkan antar negara semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita & Yani, 2005: 4).

2.1.2 Politik Internasional

Kajian pokok dalam Hubungan Internasional adalah Politik Internasional yang didalamnya mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan.

Ruang lingkup hubungan internasional meliputi seluruh tipe hubungan atau interaksi antar negara, termasuk asosiasi dan organisasi non – negara. Sedangkan ruang lingkup dari politik internasional terbatas pada “permainan kekuasaan” yang melibatkan negara – negara berdaulat. Dalam hubungan internasional terdapat aktor – aktor negara dan bukan negara, akan tetapi di dalam politik internasional pelakunya hanyalah negara.

Politik internasional adalah salah satu bentuk dari interaksi di dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan

berfokus terhadap diplomasi dan hubungan antar negara serta kesatuan – kesatuan politik lainnya. Politik internasional seperti halnya politik domestik terdiri dari berbagai kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan.

Politik internasional adalah proses interaksi yang berlangsung pada suatu tempat atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, dan *interplay* antar aktor dalam lingkungannya. Faktor – faktor utama dalam lingkungan internasional dapat dikategorikan dalam tiga hal, yaitu (1) lingkungan fisik, seperti geografi, sumber daya alam, dan teknologi suatu bangsa; (2) penyebaran sosial dan perilaku, yang didalamnya terdapat pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu; (3) munculnya lembaga – lembaga politik dan ekonomi juga organisasi-organisasi internasional dan perantara-perantara ekonomi serta politik lainnya (Perwita & Yani, 2005: 39-40).

Menurut C.J. Johari lingkup Hubungan Internasional terdapat seluruh tipe hubungan atau interaksi antar negara, termasuk asosiasi dan organisasi non-pemerintah (ekonomi, pariwisata, perdagangan, dsb). Sedangkan lingkup Politik Internasional hanya terbatas pada “power game” yang melibatkan negara-negara berdaulat (Johari, 2009: 9).

Menurut Howard Lentner dalam bukunya “*Foreign Policy Analysis*”, Politik internasional adalah salah satu bentuk dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan politik di masyarakat internasional dalam artian lebih sempit, yaitu dengan hanya berfokus pada

diplomasi, hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya, dengan kata lain politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih (Perwita & Yani, 2005: 39).

Istilah politik internasional pada dasarnya merupakan istilah tradisional yang sangat menekankan interaksi para aktor negara. Namun, pola-pola interaksi politik dalam hubungan internasional kini sudah melibatkan interaksi antar aktor negara dengan aktor non-negara. Terdapat suatu penggambaran tiga arena politik internasional, yaitu: global, region, dan nation-state yang memberikan dasar struktur analitis untuk pertimbangan politik internasional. Di dalam politik internasional, sebuah sistem merupakan keseluruhan hubungan yang berlangsung diantara unit-unit yang mempunyai kuasa di dalam arena khusus, ada tiga arena yang mewakili tiga sistem tersebut, yaitu:

1. Sistem dominan (*the dominant system*) yang berada di arena global, merupakan konfrontasi yang paling kuat dari negara-negara.
2. Sistem subordinat (*the subordinate system*) yang berada di suatu region, merupakan keseluruhan interaksi hubungan-hubungan diantara region tersebut.
3. Sistem internal (*the internal system*) yang berada di suatu negara (bangsa), merupakan keseluruhan hubungan-hubungan organisasi yang tersusun di dalam suatu politik domestik (Jemadu, 2008: 32).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Di dalam buku Perwita dan Yani para penganut realis menyetarakan bahwa kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* merupakan segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain.

Kepentingan nasional bisa diartikan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional begitu penting dalam memahami dan menjelaskan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar dalam mendefinisikan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional adalah:

“Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara” (Rudy, 2002 : 116).

Menurut Miroslav Nincic terdapat tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional yaitu:

1. Kepentingan harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan itu harus berkaitan dengan lingkungan internasional, artinya kepentingan internasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga dapat menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008 : 67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai suatu indikasi dimana negara berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang berdaulat. Selanjutnya di dalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep "*power*" kepentingan "*interest*" dijelaskan ke dalam terminologi power (Sitepu, 2011 : 56).

Kepentingan nasional juga didasari oleh suatu "*power*" yang ingin diwujudkan sehingga negara bisa memberikan dampak langsung terhadap pertimbangan negara sehingga dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan

demikian, kepentingan nasional secara konseptual digunakan dalam menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011 : 163).

2.1.4 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan “*action theory*”, atau kebijakan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani di dalam bukunya menjelaskan politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah dan sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan meningkatkan kepentingan nasional di dalam dunia internasional (Perwita & Yani, 2005: 47).

Politik luar negeri merupakan bidang kajian di dalam Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek-aspek eksternal, akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara (Perwita & Yani, 2005: 48).

Menurut Rosenau, politik luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri menurut Rosenau ditujukan untuk mempertahankan dan memelihara kelangsungan hidup negara.

Menurut Rosenau politik luar negeri meliputi kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) dan kehidupan internal (*internal life*) yang meliputi seperti aspirasi, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa (Perwita & Yani, 2005: 49).

Politik Luar negeri mempunyai dua elemen, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat untuk mencapainya. Interaksi Antara tujuan nasional dan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi (Crabb jr. dalam Couloumbis & Wolfe, 2004: 126).

Tujuan dari politik luar negeri merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan merupakan aspirasi untuk masa yang akan datang.

Menurut Plano, politik luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang akan dijangkau melalui politik luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimilikinya untuk menjangkaunya (Perwita & Yani, 2005: 51).

K.J Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan – tujuan dari politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara terhadap negara lain (Perwita & Yani, 2005: 52).

Secara lebih lanjut politik luar negeri memiliki berbagai sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri:

1. Sumber sistematis, sumber yang berasal dari lingkup eksternal seperti hubungan antar negara, aliansi dan berbagai isu area.

2. Sumber masyarakat, sumber yang berasal dari lingkungan internal seperti budaya, sejarah, ekonomi serta opini publik.
3. Sumber pemerintahan, sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur pemerintahan (Rosenau, 2006:13).

2.1.5 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, tindakan, strategi, tindakan, metode, arahan, panduan, kesepakatan, dan sebagainya, yang dengan demikian pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dan dengan organisasi internasional dan juga aktor-aktor non-pemerintah. (Carlsnaes dalam Jackson & Sorensen, 2013: 439).

Dalam mempelajari kebijakan luar negeri pada dasarnya perlu diketahui adalah *action theory* atau kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah negara tersebut dengan tujuan mencapai kepentingan nasional mereka. Hal ini berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam buku mereka yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional:

“Secara umum, kebijakan luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu isu internasional atau lingkungan sekitarnya” (Perwita & Yani, 2005: 47).

Menurut Breuning menyebutkan perkembangan dari waktu ke waktu tergantung pada konteks internasional yang terjadi. Pada awalnya, studi kebijakan luar negeri mempunyai focus utama terhadap upaya untuk memelihara dan

meningkatkan kekuatan serta keamanan suatu negara. Akan tetapi setelah perang dingin berakhir, adanya suatu fenomena globalisasi yang menjadikan ketertarikan ekonomi dunia meningkat. Kondisi ini mempengaruhi negara dalam merumuskan agenda politik luar negerinya (Breuning, 2007: 5).

Isu-isu internasional yang semakin kompleks, perkembangan kebijakan luar negeri terjadi karena bermunculan aktor-aktor baru yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Awalnya, kebijakan luar negeri melihat pada suatu negara dan pemimpinnya, namun sekarang telah berkembang terhadap diplomasi public atau usaha diplomasi pemerintah dengan target masyarakat dan aktor lain selain negara (Breuning, 2007: 6).

Rosenau dalam Perwita dan Yani mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian serta situasi di luar negaranya, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as cluster of orientation*). Kebijakan luar negeri diartikan sebagai sekumpulan orientasi dan pedoman bagi para pembuat keputusan dalam menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut.
2. Kebijakan luar negeri sebagai strategi atau rencana dalam bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*). Didalam hal ini kebijakan luar negeri diartikan sebagai rencana serta komitmen yang dikembangkan oleh pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi eksternal

yang konsisten dengan orientasi mengacu pada kebijakan luar negeri.

Rencana kebijakan luar negeri akan memberikan pedoman bagi:

1. Tindakan yang ditujukan terhadap situasi yang berlangsung lama, misalnya kebijakan luar negeri yang berkenaan dengan konflik Suriah.
 2. Tindakan yang ditujukan pada negara tertentu.
 3. Tindakan yang diperuntukkan pada isu-isu khusus.
 4. Tindakan yang ditujukan dalam berbagai sasaran lainnya, misal isu terorisme dan isu lingkungan hidup.
3. Kebijakan luar negeri dalam artian perilaku (*as a form of behavior*). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berada di tingkat yang lebih empiris, berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian dan situasi di lingkungan eksternal (Perwita & Yani, 2005: 55).

2.1.6 Terorisme Internasional

Menurut B.N. Marbun mengartikan bahwa terorisme adalah badan terorganisir yang menggunakan kekerasan dan biasanya untuk mencapai tujuan tertentu, aksi terror tersebut dipergunakan sebagai media promosi kepentingan politiknya, sehingga membuat dunia tahu apa yang mereka sedang perjuangkan. Sedangkan Sudarsono mengartikan terorisme sebagai alat penggunaan kekerasan dengan tujuan menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu dan utamanya tujuan politik (Marbun & Sudarsono dalam Golose, 2009:2).

Terorisme adalah sebuah masalah yang dihadapi oleh banyak negara di dunia karena terorisme bukan hanya mengancam keamanan suatu negara akan tetapi terorisme sudah mengancam keamanan global. Salah satu negara yang giat dalam mengkampanyekan perang melawan terorisme adalah AS. AS adalah negara adidaya yang memberikan perhatian lebih terhadap isu terorisme, karena terorisme adalah ancaman tingkat pertama bagi keamanan AS menurut dokumen NSS 2002 (Jackson dan Sorensen, 2013: 485). Kejadian 9/11 merupakan titik anjak (starting point) masyarakat dunia yang dipimpin AS untuk mendeklarasikan perang global melawan terorisme (Perwita dan Yani, 2014: 140). Namun, ada hal penting yang harus diingat yaitu terorisme pada dasarnya sudah ada selamanya dan mungkin akan terus ada (Mueller, 2004: 199)

Terorisme internasional yang terdapat pada suatu negara yang sedang berkembang mengkarakterisasikan terorisme sebagai kekerasan terhadap penduduk dan kelompok yang merasa dirugikan. Tujuan dari terorisme ini sendiri yaitu meneror penduduk. Terorisme menggunakan beberapa metode untuk melancarkan aksinya dengan cara penjajahan, dominasi, apartheid serta hegemoni terhadap suatu penduduk (Khan, 2006: 94).

Berdasarkan definisi yang dibuat oleh departemen luar negeri AS tahun 1988, seorang peneliti terorisme membuat definisi khusus mengenai terorisme:

“kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak mempunyai senjata oleh kelompok-kelompok semplan atau agen-agen bawah tanah, biasanya bertujuan untuk mempengaruhi khalayak” (Hudson dalam Djelantik, 2010: 21).

Terorisme dapat menjadi berskala internasional apabila:

1. Diarahkan terhadap warga asing atau target luar negeri.

2. Dilakukan dengan cara bersama oleh pemerintah atau faksi lebih dari satu negara
3. Diarahkan untuk memengaruhi kebijakan dari pemerintahan asing.

Aksi dari terorisme mempunyai motivasi yang berbeda tergantung dengan kondisinya masing-masing. Terorisme bisa didasarkan pada dua motif, yaitu *objective driven* dan *terror driven act*.

Objective driven act merupakan tindakan terorisme yang didasari oleh permintaan permintaan yang harus diterima oleh pemerintah. Cara yang digunakan yakni melalui penyanderaan. Sehingga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk bernegosiasi ataupun merubah kebijakannya. Sedangkan *terror driven act* didasari oleh faktor balas dendam, atau sebagai peringatan atau ancaman kekerasan yang akan terjadi apabila pemerintah tidak merubah kebijakannya (Perwita & Yani, 2005: 141).

Di dalam buku Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, bentuk bentuk terorisme internasional dapat berupa:

1. *state-sponsored terrorism*, tindakan terorisme yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingan dan tujuannya.
2. *Privately-based terrorism*, tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok tertentu atau kelompok terorisme privat (Perwita & Yani, 2005: 141).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional adalah hubungan antarnegara atau antar individu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah

pihak. Setiap negara tentunya tidak dapat terlepas dari hubungan internasional. Hal ini karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga hubungan internasional melengkapi itu. Hubungan internasional tidak hanya terjadi karena ingin bekerjasama. Persahabatan, persengketaan, permusuhan, ataupun peperangan juga termasuk hubungan internasional.

Politik Internasional segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (interest) dan kekuasaan (power) (Perwita & Yani, 2005: 39) yang mana terlihat posisi AS di Suriah yang ingin mencapai kebijakan luar negerinya yang melawan terorisme.

Pasca serangan 11 september 2001, Presiden George Bush di dalam pidatonya Dalam pidatonya ia mengatakan bahwa serangan tersebut tidak hanya menyerang Amerika Serikat akan tetapi juga menyerang peradaban dunia sehingga masyarakat internasional harus mampu melawan sebuah perang baru melawan terorisme (Triwahyuni, 2008: 9).

AS mengeluarkan kebijakan seperti NSS 2002 dan QDR 2001 yang menunjukkan bahwa serangan 9/11 telah memberikan efek yang luar biasa bagi AS. Hal itu menjadi cerminan bahwa AS serius dalam memerangi terorisme internasional supaya serangan yang sama tidak lagi dapat menyerang AS di masa depan.

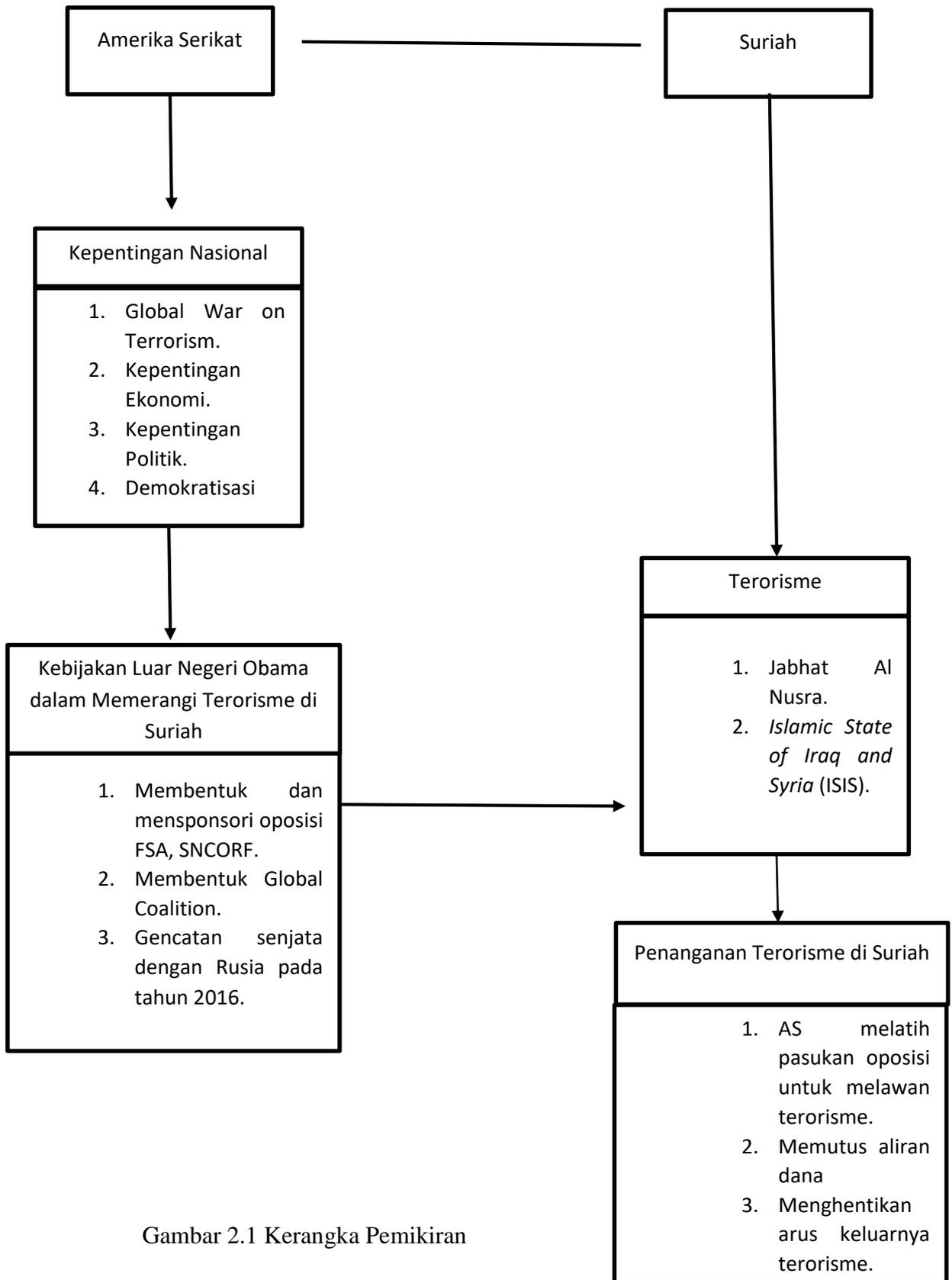
Untuk mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat yang mana Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup

kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy. 2002 : 116)” yang mana Amerika Serikat melakukan intervensi dan dukungan kepada pihak oposisi untuk menurunkan rezim Bashar Al Assad serta melawan terorisme di Suriah yang merupakan kebijakan AS agar mencapai kepentingan nasionalnya.

Setelah konflik semakin memanas yang mana ada sekelompok terorisme ISIS yang muncul di konflik internal Suriah, Menurut B. N. Marbun terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan biasanya untuk mencapai tujuan tertentu, aksi teror tersebut digunakan sebagai media promosi kepentingan politiknya, sehingga dunia menjadi tahu apa yang mereka perjuangkan. Sedangkan Sudarsono mengartikan terorisme sebagai suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu terutama tujuan politik (Marbun & Sudarsono dalam Golose, 2009: 2). Dan disinilah peran Amerika Serikat Sebagai Polisi dunia untuk memberantas terorisme yang mana termasuk kedalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam melawan terorisme.

Terorisme merupakan masalah besar bagi AS dan semua negara di dunia karena terorisme telah mengancam keamanan negara dan bahkan mengancam keamanan global karena efek yang di sebabkan terorisme sangat luas dan tidak terbatas hanya pada level suatu negara saja. Pada faktanya terorisme tidak hanya terjadi di negara berkembang dan miskin saja akan tetapi terjadi juga di negara maju dengan militer yang kuat.

AS yang menggunakan kebijakan GWOT melakukan kampanye global dengan tujuan untuk menyamakan pandangan dunia terhadap terorisme yang akan dihadapi AS. Dalam kampanyenya, AS akan membantu negara di dunia untuk mengalahkan kelompok dengan cara bekerjasama dan memberikan bantuan militer yang ditujukan untuk memerangi kelompok terorisme yang disepakati. Target AS dalam perang global melawan terorisme yaitu menghancurkan kekuatan kelompok yang ada di dunia yaitu salah satu yang utama adalah kelompok ISIS. Selain menghancurkan kekuatan ISIS, AS juga akan memberantas kelompok yang memiliki hubungan dengan kelompok tersebut hingga ke seluruh penjuru dunia dan salah satu kawasan yang signifikan dalam kepentingan AS adalah kawasan Timur Tengah tepatnya Suriah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran